

PARAREM
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT (BUPDA)
BALER BALE AGUNG



DESA ADAT BALER BALE AGUNG
KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025

PARAREM DESA ADAT BALER BALE AGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT (BUPDA) BELER BALE
AGUNG

ATAS ASUNG KERTA WARU NUGRAHA IDA HYANG WIDHI WASA PARUMAN
DESA ADAT BALER BALE AGUNG

- Menimbang : a bahwa Desa Adat Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari nilai– nilai kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali;
- b. bahwa Desa Adat Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana memiliki kedudukan startegis berperan dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan padruwen Desa Adat Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. dipandang perlu untuk dibentuk baga usaha padruwen desa adat yang berfungsi untuk mengelola padruwen desa adat secara optimal dan berdayaguna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c diatas, maka dipandang perlu membentuk Perarem Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Baler Bale Agung
- Mengingat : 1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Keuangan Desa Adat di Bali
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Pararem Desa Adat;

9. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 09/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa Adat;
10. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 07/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA);
11. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 06/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman Panyuratan Pararem indik Baga Utsaha Padruwen Desa Adat;
12. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 09/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman Muputang Wicara miwah Niwakang Pamidanda ring Desa Adat;
13. Awig-Awig Desa Adat Baler Bale Agung Tahun 1985

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat / *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada Hari Rabu Tanggal 24 September 2025 tentang Pengesahan Pararem (BUPDA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pararem Desa Adat Baler Bale Agung Tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Baler Bale Agung

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem Desa Adat ini yang dimasuk dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Desa Adat adalah Desa Adat Baler Bale Agung yang ada di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
4. Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
5. Sabha Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
6. Pengelola BUPDA adalah Pengelola BUPDA Baler Bale Agung yaitu organ kelembagaan BUPDA yang terdiri atas *Panureksa* atau Pengawas Internal dan *Pangoreg* atau Pengurus.
7. *Panureksa* adalah Krama Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.

8. *Pangoreg* adalah Krama Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.
9. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan dibidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
10. *Bandesa* Adat adalah Bandesa Adat Baler Bale Agung
11. *Prajuru* Desa Adat adalah Prajuru Desa Adat Baler Bale Agung
12. *Paruman* Desa Adat Baler Bale Agung adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Baler Bale Agung
13. *Pasangkepan* Desa Adat Baler Bale Agung adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis oprasional sebagai pelaksanaan keputusan paruman Desa Adat Baler Bale Agung
14. *Awig-Awig* Desa Adat Baler Bale Agung adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat Baler Bale Agung yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu diwewidangan Desa Adat Baler Bale Agung
15. *Wewidangan* Desa Adat Baler Bale Agung yang selanjutnya disebut Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Baler Bale Agung yang memiliki batas-batas tertentu.
16. *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Baler Bale Agung
17. *Krama* Tamiu adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat Baler Bale Agung
18. Tamiu adalah orang selain *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung dan *Krama* Tamiu yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Baler Bale Agung untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Baler Bale Agung
19. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat Baler Bale Agung
20. *Labda* adalah hasil usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan religius.
21. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA DesaAdat Baler Bale Agung adalah perencanaan pemasukan dan pengeluaran BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung secara sistimatis untuk masa waktu 1 (satu) tahun,guna diajukan pada Prajuru Desa Adat untuk dibahas, dandi setujui (disepakati) Bersama yang selajutnya menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

BUPDA Desa Adat didirikan berdasarkan asas:

- a. *kawigunan* (kemanfaatan);
- b. *padumpada* (Keadilan);
- c. *manyama-braya* (kekeluargaan);
- d. *gilik-saguluk* (kebersamaan);
- e. *parasparo* (musyawarah);
- f. *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan);
- g. *Bali mawacara* (kesatuan Bali);
- h. *Desa mawacara* (tradisi seetempat);
- i. *sareng-sareng* (partisipasi);

- j. *satyagraha* (kemandirian);
- k. *pangunadikaan* (pemberdayaan); dan
- l. *melanting* (berkelanjutan).

Pasal 3

Pendirian BUPDA dimaksudkan sebagai lembaga *utsaha* Desa Adat yang diarahkan pada sektor usaha perekonomian/sektor riil yang dikelola dengan sistem manajemen modern dan untuk mewadahi/menampung seluruh kegiatan pengelolaan *utsaha* dan/atau *padruwen* Desa Adat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup *Krama* Desa Adat yang berlandaskan pada filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Pasal 4

Sebagai bentuk usaha Desa Adat, BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung didirikan bertujuan:

- a. Meningkatkan *sraddha bhakti Krama* terhadap kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*;
- b. Mewujudkan sistem perekonomian desa adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya untuk memperkuat sistem perekonomian nasional;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial budaya *Krama* Desa Adat guna mewujudkan *Krama* desa adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional;
- d. Mewujud nyatakan implementasi dari nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- e. Mendorong dan memajukan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat desa adat yang dijiwai oleh Agama Hindu;
- f. Memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan potensi Desa Adat sehingga bermanfaat dan bernilai guna bagi keberlangsungan kehidupan perekonomian *Krama* Desa Adat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa Adat melalui usaha kreatif dan peluang usaha produktif;
- i. Meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat; dan
- j. Menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi *Krama* DesaAdat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung meliputi :

- a. Nama, Logo dan Kedudukan;
- b. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk Usaha;
- c. Pembubaran dan Pembekuan Unit Usaha
- d. Tata Kelola;
- e. Perlindungan dan pengayoman;
- f. Kedudukan *Krama* Desa Adat;
- g. Labda;
- h. Pendapatan dan dana punia; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

NAMA, LOGO DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama dan Logo

Pasal 6

- (1) *Utsaha* Desa Adat Baler Bale Agung bernama BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung merupakan usaha Desa Adat Baler Bale Agung yang bergerak disektor riil.
- (2) Nama BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimanfaatkan oleh Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 7

- (1) Logo BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagai berikut:



- (2) Logo BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari yaitu :
 - a. Padi dan Kapas
 - b. Gedung
 - c. Tangan Berjabat
- (3) Arti Keseluruhan :

BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang merupakan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat Berkomitmen Membangun Desa Adat dengan tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat / *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung melalui Pembangunan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial, dengan moto: “Jaya Bupda Baler Bale Agung Sejahtera Krama Desa Adat.” yang berasaskan Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membangun perekonomian masyarakat berkemandirian.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 8

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagai substansi kelembagaan *Utsaha Desa Adat Baler Bale Agung* yang berkedudukan di wilayah / *wewidangan* Desa Adat Baler Bale Agung

- (2) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagai substansi kelembagaan *Utsaha* Desa Adat Baler Bale Agung yang bergerak dibidang sektor riil merupakan sebuah lembaga pengelola *Utsaha* dan / atau *padruwen* Desa Adat yang terintegrasi, mandiri dan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan *Utsaha padruwen Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) atau sebutan lain.

BAB III

PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN BENTUK USAHA

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 9

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung didirikan berdasarkan persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- (2) Persetujuan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan *Paruman* Desa Adat yang penandatangananannya dimandatkan kepada *Prajuru* Desa Adat, bersama manggala *Sabha* Desa Adat.

Bagian Kedua Kepemilikan dan Bentuk Usaha

Pasal 10

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung hanya dimiliki oleh Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) BUPDA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan dikelola berdasarkan Pararem ini.

Pasal 11

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung merupakan lembaga usaha yang didirikan untuk mengusahakan dan / atau mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat.
- (2) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung atau secara tidak langsung dengan membentuk unit-unit usaha.
- (3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau menurut *awig – awig* dan *pararem*.
- (4) Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ekonomi dan peluang usaha di Wewidangan Desa Adat;
 - b. *Padruwen / aset* Desa Adat Baler Bale Agung yang diserahkan pengelolaannya kepada BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - c. penyertaan modal dari Desa Adat Baler Bale Agung;
 - d. potensi sumber daya *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung;
 - e. keberadaan unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* DesaAdat; dan
 - f. unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat yang pengelolaannya yang dikerjasamakan dengan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 12

BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dalam mengusahakan dan / atau mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat, diarahkan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Desa Adat;
- b. mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen* / aset Desa Adat agar bermanfaat untuk kesejahteraan Krama Desa Adat dan Desa Adat Baler Bale Agung ;
- c. mengembangkan kerjasama usaha Desa Adat Baler Bale Agung dengan Desa Adat lain dan / atau dengan pihak ketiga;
- d. meningkatkan partisipasi dan usaha Krama Desa Adat Baler Bale Agung dalam pengelolaan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat;
- e. membuka lapangan kerja di Wewidangan Desa Adat;
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan layanan umum Krama;
- g. mengembangkan profesionalisme dan kewirausahaan Krama Desa Adat Baler Bale Agung ;
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat dan Desa Adat Baler Bale Agung melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa Adat ; dan
- i. meningkatkan pendapatan Krama Desa Adat dan Desa Adat Baler Bale Agung yang bersumber dari hasil pengelolaan *Padruwen* / aset Desa Adat.

Pasal 13

BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagai lembaga usaha yang dimiliki Desa Adat berfungsi untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, memfasilitasi, dan membina unit-unit usaha dan / atau melakukan kegiatan usaha secara langsung.

Pasal 14

- (1) Dalam hal unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bentuk organisasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung atau dimiliki bersama dengan Krama Desa Adat, kelompok Krama Desa, Desa Adat lain, dan / atau pihak ketiga.
- (3) Kepemilikan saham oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung
- (4) Unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) dimiliki oleh BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 15

- (1) Dalam hal unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(3), bentuk organisasinya didasarkan pada Keputusan *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) Keputusan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara kolektif kolegial yang ditandatangani bersama oleh *Bandesa* Adat dan *Panyarikan* Desa Adat.

BAB IV

PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN UNIT USAHA

Pasal 16

- (1) Unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibubarkan dalam hal :
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
 - c. tidak mematuhi dan melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali; dan
 - d. melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dibekukan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali; dan
 - c. tidak mematuhi dan tidak melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali.
- (3) Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembekuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan *Paruman* Desa Adat.

Pasal 17

Prajuru Desa Adat Baler Bale Agung berkewajiban melaporkan setiap pembubaran atau pembekuan unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat, dan SAKA Bali.

BAB V BIDANG USAHA DAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 18

- (1) BUPDA Baler Bale Agung melaksanakan bidang usaha sektor riil yang mencakup:
 - a. produksi;
 - b. distribusi dan/atau perdagangan; dan
 - c. jasa.
- (2) Usaha dalam bidang produksi, distribusi, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan usaha di sektor primer dan sektor sekunder.
- (3) Usaha dalam bidang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan usaha pelayanan di sektor tersier.

Bagian Kedua Modal

Paragraf 1 Sumber modal

Pasal 19

- (1) Modal (kamulan) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung bersumber dari :
 - a. kas Desa Adat;
 - b. harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat dan/atau yang disisihkan dan dipisahkan untuk pendirian BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat Baler Bale Agung;
 - c. paturunan /iuran *Krama* Desa Adat;
 - d. penyisihan Labda usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - e. penyisihan hasil pengelolaan aset *Padruwen* Desa Adat yang dialihkan pengelolaannya kepada BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - f. pinjaman dari Labda Pencingkreman Desa Adat / Lembaga Perkreditan Desa
- (2) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

Paragraf 2 Struktur Modal

Pasal 20

- (1) Modal BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung terdiri atas:
 - a. modal disetor;
 - b. modal organik; dan
 - c. modal sumbangan.
- (2) Modal BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dicatatkan sebagai modal disetor.
- (3) Modal BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf e dicatatkan sebagai modal organik.
- (4) Modal BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dicatatkan sebagai modal sumbangan.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dikelola secara professional berdasarkan:

- a. nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
- b. tata kelola perusahaan yang baik;
- c. kehati-hatian; dan
- d. praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini.

Bagian Kedua Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan BUPDA Desa adat Baler Bale Agung dilaksanakan oleh Pengelola.

- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Panureksa*; dan
 - b. *Pangoreg*.
- (3) *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Manggala/Ketua; dan
 - b. Angga/Anggota.
- (4) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. *Manggala/Kepala*;
 - b. *Patajuh Utsaha/Wakil Kepala Bidang Bisnis*; dan
 - c. *Patajuh Pangraksa/Wakil Kepala Bidang Umum*.
- (5) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 23

- (1) Pengelola BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung diangkat dan diberhentikan oleh Prajuru Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) Masa jabatan pengelola BUPDA selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 24

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dapat mengangkat *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha.
- (2) *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat dan diberhentikan oleh *Pangoreg* dengan persetujuan *Panureksa*.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung
- (4) *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat membentuk kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan *Pangoreg*.

Pasal 25

- (1) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang merangkap jabatan:
 - a. *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, *Kerta* Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat atau dengan sebutan lainnya
 - b. pimpinan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah;
 - c. Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan lainnya;
 - d. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan kelengkapan Desa/Kelurahan lainnya; dan
 - e. Pengurus partai politik dan/atau pejabat publik.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat / ditetapkan sebagai *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. sudah menjadi Krama Desa Adat Baler Bale Agung sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal tingkat SMA atau yang sederajat;
 - d. memahami tata kelola bisnis;
 - e. memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan audit;
 - f. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan / atau sanksi adat;
 - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik;
 - j. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan pailit; dan
 - k. kesanggupan bekerja disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat / ditetapkan sebagai *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
- a. sudah menjadi Krama Desa Adat Baler Bale Agung sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal tingkat SMA atau yang sederajat;
 - d. memahami tata kelola bisnis;
 - e. memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan
 - f. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan / atau sanksi adat;
 - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik;
 - j. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan pailit; dan
 - k. kesanggupan bekerja disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.
- (4) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian BUPDA Desa adat Baler Bale Agung.

Pasal 26

- (1) *Panureksa* mempunyai tugas :
- a. memastikan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dikelola secara profesional dengan mengacu kepada nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola perusahaan yang baik, prinsip-prinsip kehati-hatian serta praktek-praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini;
 - b. mengevaluasi kebijakan umum strategis dan rencana strategis 5(lima) tahunan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang diajukan oleh *Pangoreg* dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk memperoleh persetujuan;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - d. mengevaluasi perubahan kebijakan umum dan rencana strategis 5(lima) tahunan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung untuk memperoleh persetujuan;
 - e. mengevaluasi sistem perekrutan dan pendapatan pengelola BUPDA DesaAdat Baler Bale Agung serta menyampaikan hasilnya kepada *Prajuru* DesaAdat Baler Bale Agungi untuk mendapat persetujuan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang *Pangoreg*;
 - g. memberikan saran dan nasihat kepada *Pangoreg* terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan/atau unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - h. melakukan penilaian kinerja tahunan dan kinerja selama 5(lima) tahunan *Pangoreg*;

- i. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran kepada *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung tentang perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada SAKA Bali tentang penerapan tata kelola BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang baik;
 - k. mengevaluasi realisasi rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan *Pangoreg*; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran tentang pelaksanaan tugas dan wewenang *Panureksa* kepada *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) *Panureksa* mempunyai wewenang :
- a. menyetujui perubahan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - b. memberikan persetujuan atas sistem perekrutan dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - c. memberikan persetujuan atas sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lain yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - d. memberikan persetujuan terhadap usulan penunjukan auditor eksternal oleh *Pangoreg* untuk melakukan audit tahunan terhadap BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung secara keseluruhan;
 - e. menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu bila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Pangoreg* yang berpotensi merusak reputasi BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan atau menimbulkan kerugian finansial yang signifikan;
 - f. merekomendasikan pengenaan sanksi kepada *Prajuru* Desa Adat apabila *Pangoreg* melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap Pararem BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung; dan
 - g. mengenakan sanksi administratif kepada *Pangoreg* apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 27

- (1) *Pangoreg* mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan kebijakan umum strategis kepada *Panureksa*;
 - b. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan setelah mendapatkan persetujuan *Prajuru* Desa Adat;
 - c. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - d. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem perekrutan dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Baler bale Agung setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - e. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem tata kelola usahadan sistem penunjang lainnya setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - f. menyusun dan mengusulkan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Baler bale Agung untuk mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - g. melaksanakan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung setelah mendapat persetujuan *Panureksa*;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan usaha setiap triwulan kepada *Panureksa*;
 - i. melaporkan realisasi pelaksanaan rencana bisnis tahunan kepada *Panureksa* setiap bulan;

- j. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi semesteran tentang perkembangan usaha masing-masing unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung kepada SAKA Bali, setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan konsolidasi tahunan tentang perkembangan usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
 - l. melaporkan realisasi rencana bisnis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan kepada *Panureksa*.
- (2) *Pangoreg* mempunyai wewenang :
- a. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - b. menyetujui penggunaan anggaran oleh unit-unit usaha;
 - c. menyetujui pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - d. menandatangani kerjasama BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung atau unit-unit usaha dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; dan
 - c. diberhentikan sewaktu – waktu
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Pengelola yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - b. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian *Prajuru* Desa Adat dan hasil evaluasi tahunan oleh *Panureksa* melalui Paruman Desa Adat;
 - c. kehilangan status sebagai *Krama* Desa Adat;
 - d. dinyatakan bersalah terpidana, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dinyatakan bersalah telah melanggar awig – awig atau pararem berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan / atau
 - g. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal pengelola BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka harus mendapatkan persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila salah satu / bersama-sama, *Pengelola* berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya, *Prajuru* Desa Adat dapat menunjuk pelaksana tugas.
- (5) *Prajuru* Desa Adat menunjuk dan mengangkat pengganti *Pengelola* yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluarnya keputusan pemberhentian Pengelola

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dapat dilaksanakan rapat rutin dan rapat insidental.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan sekali;
 - b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

- c. rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran BUPDA;
 - d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran BUPDA atau setelah diterimanya laporan audit independen; dan
 - e. rapat rutin lain yang diperlukan.
- (3) Rapat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila ada masalah atau kebutuhan penting dan mendesak atas permintaan *Panureksa*, *Pangoreg*, atau *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 30

Prajuru Desa Adat dapat melaksanakan Paruman Padgata Kala Desa Adat apabila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 31

Ketentuan tata cara penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, sesuai dengan :

- a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai / unit usaha dipimpin oleh *Pangoreg*;
- b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pengoreg* dipimpin oleh *Manggala* / Ketua *Panureksa* atau yang ditunjuk;
- c. rapat Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA dipimpin oleh *Manggala* / Kepala *Pangoreg* atau yang ditunjuk dengan dihadiri oleh *Panureksa*, dan *Prajuru* Desa Adat untuk mendapatkan persetujuan;
- d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg* dipimpin oleh *Manggala* / Kepala *Pangoreg* dengan dihadiri oleh *Panureksa*, dan *Prajuru* Desa Adat; dan
- e. Pimpinan dan peserta rapat lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Tata Kelola Usaha

Pasal 32

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri.
- (2) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa / Kelurahan atau pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui prosedur:
 - a. kepemilikan bersama; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 33

- (1) Kerjasama melalui prosedur kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Prajuru* Desa Adat.

- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAKA Bali.

Pasal 34

- (1) Kerjasama melalui prosedur kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan perkembangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik semesteran dan tahunan kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) harus diakhiri, apabila BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung tidak lagi memperoleh manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan berakhirnya kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasannya paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.

Pasal 36

- (1) Desa Adat Baler Bale Agung dapat mengoptimalkan kemanfaatan artha brana Padruwen Desa Adat dengan mengalihkan pengelolaannya kepada BUPDA.
- (2) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung mengelola artha brana Padruwen Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. setelah mendapat persetujuan dalam *Paruman* Desa Adat; dan
 - b. sesuai dengan prinsip saling menguntungkan, tata kelola usaha yang baik, dan kehati-hatian.
- (3) Pengelola BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dilarang menggunakan *artha brana Padruwen* Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Bagian Keempat Tata Kelola Keuangan

Pasal 37

- (1) Tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Bale Bale Agung dan unit-unit usaha dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa Adat Baler Bale Agung.
- (2) Pengelola BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari tata kelola keuangan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) *Pangoreg* bertanggung jawab penuh terhadap tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) Tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh *Pangoreg* kepada *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.

Pasal 39

Kasinoman unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan kepada *Pangoreg* BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 41

- (1) BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung mempertanggungjawabkan keuangan dengan menggunakan tahun buku.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN

Pasal 42

- (1) Gubernur dan MDA Provinsi Bali sebagai pelindung dan pengayom BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) Dalam memberikan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SAKA Bali

Pasal 43

- (1) *Prajuru* Desa Adat memberikan perlindungan dan pengayoman BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung di *Wewidangan* Desa Adat Baler Bale Agung.
- (2) Perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan hukum adat, jaminan keuangan, jaminan keberlanjutan, dan akses kepada *Krama* Desa Adat.

Pasal 44

- (1) *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung dalam memberikan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai tugas:
 - a. melindungi dan mengayomi keberadaan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - b. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
 - c. melaporkan perkembangan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung kepada *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung dalam *Paruman* Desa Adat;
 - d. mensosialisasikan keberadaan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung kepada *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung;
 - e. memberikan pendampingan kepada *Pangoreg* untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dengan pihak lain; dan
 - f. menyelenggarakan *Paruman* padgata kala apabila ada kebutuhan mendesak yang dapat berpengaruh penting / signifikan terhadap keberlangsungan usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) *Prajuru* Desa Adat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan kepada SAKA Bali pengangkatan, pemberhentian, dan perpanjangan *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA Desa Adat Bale Bale Agung;
- b. menilai laporan kinerja usaha BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang disampaikan oleh *Panureksa* BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
- c. melakukan penindakan sesuai Awig-Awig dan / atau Pararem Desa Adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh *Panureksa*, *Pangoreg*, dan *Krama* Desa Adat terkait pengelolaan operasional BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
- d. mewakili Desa Adat Baler Bale Agung dalam berkoordinasi dengan pihak di luar DesaAdat Baler Bale Agung terkait dengan pengelolaan BUPDA;
- e. menyelesaikan wicara adat yang terjadi terkait dengan pengelolaan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung;
- f. memberikan pembinaan kepada *Panureksa* dan *Pangoreg*; dan
- g. meminta pertanggungjawaban *Panureksa* dan *Pangoreg*.

BAB VIII KEDUDUKAN KRAMA DESA ADAT

Pasal 45

- (1) *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemilikan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung.
- (2) *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung menjadi pemilik BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung terhitung mulai (ngawit) yang bersangkutan Mipil sebagai *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung
- (3) *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung berhenti dan / atau diberhentikan (kausanang) menjadi pemilik BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung terhitung mulai (ngawit) yang bersangkutan tidak lagi menjadi *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung sesuai *Awig-Awig* dan / atau *Pararem* Desa Adat Baler Bale Agung.
- (4) *Krama* Desa Adat berhenti dan / atau diberhentikan (kausanang) sebagai pemilik BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung mengikuti *Awig-Awig* dan / atau *Pararem* Desa Adat Baler Bale Agung, sesuai dengan prinsip adat *maserah* kalah atau *guwak ngutang taluh*.

Pasal 46

- (1) *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung berkewajiban:
 - a. menjaga keberadaan, citra, keselamatan, dan kelancaran kegiatan BUPDA Desa adat Baler Bale Agung dengan mendukung dan mengutamakan pemanfaatan produk dan / atau jasa BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung.
 - b. selalu mencintai dan memanfaatkan produk dan / atau jasa BUPDA DesaAdat Baler Bale Agung
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BUPDA DesaAdat Baler Bale Agung kepada warga lainnya; dan
 - d. mendukung program dan kegiatan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung agar tetap *rajeg* (kuat dan berkelanjutan) sebagai *Utsaha Padruwen* Desa Adat atas dasar sikap dan perilaku *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan), Bali *mawacara* (kesatuan Bali), dan *sareng-sareng* (partisipasi).
- (2) *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung berhak mendapatkan pelayanan produk dan / atau jasa BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung yang berkualitas dengan penilaian yang wajar atas dasar *padumpada* (keadilan), *gilik-saguluk* (kebersamaan), dan *Parasparo* (musyawarah)

BAB IX LABDA

Pasal 47

- (1) Labda BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung berupa:
 - a. manfaat *Sakala*; dan
 - b. manfaat *Niskala*
- (2) Manfaat *Sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan manfaat finansial dan nonfinansial yang diperoleh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kolektif *Krama* Desa Adat Baler Bale Agung
- (3) Manfaat *Niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*.

Pasal 48

- (1) Labda *Sakala* berupa finansial dialokasikan secara langsung setiap akhir tahun sebagai anggaran pengeluaran tahun berikutnya untuk BUPDA Desa Adat Baler bale Agung dan Desa Adat Baler bale Agung.
- (2) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Adat Baler bale Agung.
- (3) Pengelola BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung wajib mengalokasikan anggaran 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:
 - a. pembentukan modal organik sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. jasa produksi dan bonus untuk pengelola dan pegawai BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. iuran untuk pelaksanaan tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (limapersen).
- (4) Alokasi anggaran yang diterima oleh Desa Adat Baler bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat, digunakan untuk:
 - a. dana sosial;
 - b. dana *Panca Yadnya*;
 - c. dana operasional dan olih-olihan *Prajuru* Desa Adat;
 - d. dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat;
 - e. dana *catu* untuk Banjar Adat; dan
 - f. iuran kepada MDA.
- (5) ketentuan tata cara penggunaan *Labda* BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai hukum adat yang berlaku.
- (6) alokasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) yang besaran persentasanya sesuai keputusan *Prajuru* Desa Adat Baler Bale Agung

BAB X PENDAPATAN DAN DANA PUNIA

Pasal 49

- (1) Pengelola dan Pegawai BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung memperoleh pendapatan berupa:
 - a. *patias*;
 - b. *olih-olihan*;
 - c. fasilitas; dan
 - d. manfaat lainnya.
- (2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung.

- (3) Ketentuan pendapatan dan besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bandesa Adat.

Pasal 50

- (1) Setiap Krama Desa Adat yang memperoleh pendapatan dari BUPDA DesaAdat Baler Bale Agung berkewajiban menyisihkan dana punia berupa uang kepada Desa Adat Baler Bale Agung
- (2) Desa Adat Baler Bale Agung berkewajiban membuat rekening dana punia atas namaDesa Adat untuk menampung dan menyimpan dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka pada Labda Pacingkreman Desa Adat/ nama lain milik Desa Adat Baler Bale Agung atau Bank Umum.
- (4) Dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Desa Adat Baler Bale Agung sesuai Pararem untuk membiayai kegiatan sakala dan niskala.
- (5) Ketentuan tata cara penyisihan dan pemanfaatan dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dengan Pararem.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung mendapat pembinaan dan pengawasan berupa:

- a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
- b. pembinaan dan pengawasan fungsional.

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, dilaksanakan oleh SAKA Bali.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (3), dikenakan sanksi adat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 54

- (1) Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*.
- (2) Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1), dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berupa:
 - a. *Pamidanda adat ringan*, yaitu kaglemekin (teguran lisan/tertulis); *ngaksama* (permintaan maaf) kepada Prajuru Desa Adat;
 - b. *Pamidanda adat sedang*, yaitu: *ngaksama* (permintaan maaf) kepada Prajuru Desa Adat, *danda pacamil* (denda akibat ucapan yang menimbulkan perasaan tidak senang), *manging-ening* atau *madewa saksi*, melaksanakan upacara *pamarisuda*, seperti *prayascita*, *macaru*;
 - c. *Pamidanda berat* yaitu: *ngaksama* kepada Krama Desa Adat dalam Paruman Agung Desa Adat dan *pangrampagan/krandahin* (penyitaan harta benda);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - e. pembekuan usaha.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 56

Pararem ini sewaktu-waktu dapat kauwah-uwihin (diubah) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi maupun kondisi BUPDA Baler Bale Agung melalui Paruman Agung

Pasal 57

Pararem BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung ini mulai berlaku pada tanggal disosialisasikan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pada Prajuru Desa Adat Baler Bale Agung untuk mensosialisakannya

DITETAPKAN DI DESA ADAT BALER BALE AGUNG
PADA TANGGAL SEPTEMBER 2025

DESA ADAT BALER BALE AGUNG, KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA

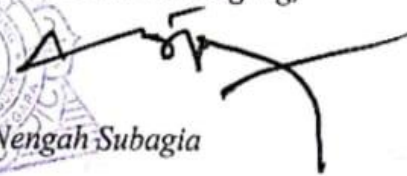
Bandesa Adat Baler Bale Agung,

Pasal 57

Pararem BUPDA Desa Adat Baler Bale Agung ini mulai berlaku pada tanggal disosialisasikan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pada Prajuru Desa Adat Baler Bale Agung untuk mensosialisakannya

DITETAPKAN DI DESA ADAT BALER BALE AGUNG
PADA TANGGAL SEPTEMBER 2025

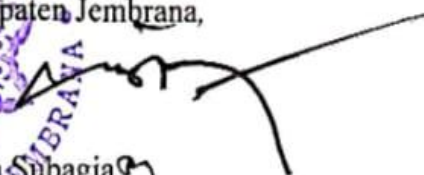
DESA ADAT BALER BALE AGUNG, KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA


Bandesa Adat Baler Bale Agung,
I Nengah Subagia

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL
PENYARIKAN DESA ADAT

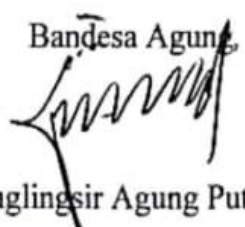

I Kade Diatmika

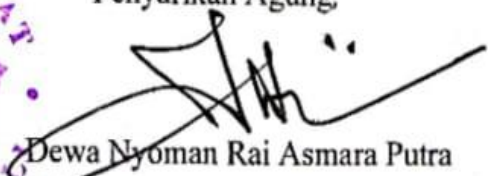
PENGERAMPIH


MAJELIS DESA ADAT
MDA Kabupaten Jembrana,
I Nengah Subagia


MAJELIS DESA ADAT
MDA Kecamatan Negara,
I Nengah Sudama

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
TANGGAL : 2 Januari 2026
NOMOR : 003/PRM/MDAP/1/2026


Bandesa Agung,
Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet


MAJELIS DESA ADAT
PROVINSI BALI
Penyarikan Agung,
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 6 Januari 2026
Registrasi Nomor : P/0015/0219/013/02/DPMA/2026